1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Selama Triwulan II (April – Juni 2026), perkembangan harga di Kabupaten Cirebon menunjukkan pola pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447H, yaitu koreksi harga yang tajam di bulan April setelah lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai puncaknya pada Minggu IV Maret 2026 (4,24%), diikuti kenaikan harga yang wajar dan terkendali pada Mei–Juni 2026 seiring pemulihan permintaan pasca-lebaran.

**April 2026 — Tren Deflasi/Koreksi Harga**

IPH Kabupaten Cirebon sepanjang April 2026 konsisten berada pada zona penurunan (deflasi), terkoreksi tajam dari puncak Maret 2026. Penurunan pada seluruh minggu di bulan April dipicu oleh turunnya harga Cabe Rawit, Daging Ayam Ras, dan Daging Sapi menyusul normalisasi permintaan pasca-Idul Fitri.

**Mei 2026 — Tren Kenaikan Terkendali**

Memasuki Mei 2026, IPH kembali bergerak naik namun dalam rentang yang wajar dan terkendali (0,32% hingga 0,82%), didorong oleh kenaikan harga Cabai Merah dan Cabe Rawit yang menjadi komoditas dengan andil tertinggi di setiap minggunya.

**Juni 2026 — Naik di Awal, Kembali Menurun di Akhir Bulan**

IPH Juni 2026 sempat mencapai titik tertinggi triwulan ini pada Minggu I (0,92%) akibat kenaikan harga Daging Sapi, sebelum kembali menurun pada Minggu III dan IV dipicu turunnya harga Cabai Merah dan Daging Ayam Ras.

Rincian mingguan IPH Kabupaten Cirebon selama Triwulan II 2026 sebagai berikut:

| Minggu | IPH (%) | Komoditas Andil Tertinggi | Fluktuasi Harga Tertinggi |
|---|---|---|---|
| M1 April 2026 | -1,39 | Cabe Rawit (-1,39%); Daging Sapi (-0,51%); Cabe Merah (-0,36%) | Cabe Rawit |
| M2 April 2026 | -2,17 | Cabe Rawit (-1,43%); Daging Ayam Ras (-0,70%); Daging Sapi (-0,51%) | Cabe Rawit |
| M3 April 2026 | -2,76 | Cabe Rawit (-1,54%); Daging Ayam Ras (-0,98%); Daging Sapi (-0,51%) | Cabe Rawit |
| M4 April 2026 | -2,98 | Cabe Rawit (-1,59%); Daging Ayam Ras (-1,13%); Daging Sapi (-0,51%) | Cabe Rawit |
| M1 Mei 2026 | 0,32 | Cabai Merah (0,50%); Cabe Rawit (0,30%); Daging Ayam Ras (0,07%) | Cabe Merah |
| M2 Mei 2026 | 0,42 | Cabai Merah (0,73%); Cabe Rawit (0,35%); Bawang Merah (0,03%) | Cabai Merah |
| M3 Mei 2026 | 0,82 | Cabai Merah (0,88%); Cabe Rawit (0,47%); Daging Sapi (0,14%) | Cabai Merah |
| M1 Juni 2026 | 0,92 | Daging Sapi (0,92%); Bawang Merah (0,40%); Cabe Rawit (0,09%) | Daging Sapi |
| M2 Juni 2026 | 0,30 | Daging Sapi (-0,85%); Bawang Merah (-0,40%); Bawang Putih (-0,21%) | Daging Sapi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| M3 Juni 2026 | -0,47 | Daging Ayam Ras (-0,77%); Cabai Merah (-0,62%); Telur Ayam Ras (-0,17%) | Cabai Merah |
| M4 Juni 2026 | -1,02 | Cabai Merah (-0,88%); Daging Ayam Ras (-0,82%); Cabai Rawit (-0,31%) | Cabai Merah |

**Konteks Inflasi Kota Cirebon (Kota Referensi IHK)**

Karena Kabupaten Cirebon belum memiliki Indeks Harga Konsumen (IHK) tersendiri, capaian inflasi turut mengacu pada inflasi Kota Cirebon sebagai kota referensi terdekat. Inflasi Kota Cirebon pada Juni 2026 tercatat melambat menjadi 0,10% (month-to-month), dengan inflasi tahun berjalan (year-to-date) sebesar 1,47% dan inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,90% — masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5% ± 1%, serta lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Barat maupun nasional.

Faktor pendorong terkendalinya inflasi antara lain stabilitas pasokan daging dan telur ayam ras, sementara tekanan utama datang dari kenaikan harga BBM non-subsidi serta keterbatasan pasokan komoditas hortikultura akibat transisi musim kemarau.

**Risiko ke Depan**

1. Keterbatasan pasokan hortikultura (Cabai Rawit, Cabai Merah, Bawang Merah) akibat transisi musim kemarau menjelang Triwulan III 2026;
2. Tekanan dari kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap biaya distribusi bahan pangan;
3. Volatilitas harga Daging Sapi dan Daging Ayam Ras yang masih menjadi komoditas dominan penyumbang fluktuasi IPH;
4. Potensi lonjakan permintaan menjelang periode-periode tertentu yang perlu diantisipasi melalui perluasan cakupan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kios Pengendali Inflasi (KOSPI).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sejalan dengan dinamika harga pada Triwulan II 2026, teridentifikasi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Cirebon, baik pada aspek kebijakan makro maupun pada pelaksanaan program intervensi harga di lapangan.

a. **Permasalahan Umum**
   - Fluktuasi harga komoditas hortikultura dan protein hewani (Cabe Rawit, Cabai Merah, Daging Sapi, Daging Ayam Ras) masih menjadi kontributor dominan pergerakan IPH setiap minggunya, menunjukkan ketergantungan tinggi pada pasokan yang rentan terhadap faktor musiman;
   - Tekanan dari komponen non-pangan, khususnya kenaikan harga BBM non-subsidi, berpotensi merembet pada biaya distribusi dan harga jual bahan pokok;
   - Keterbatasan kapasitas infrastruktur pangan serta ketergantungan pasokan hortikultura dari luar daerah pada masa transisi musim kemarau.
b. **Permasalahan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)**
   - Berdasarkan evaluasi pelaksanaan GPM sepanjang tahun berjalan, teridentifikasi

beberapa kendala teknis di lapangan yang turut menjadi perhatian pada Triwulan II 2026:

- Keterbatasan stok — kuota bahan pangan pokok kerap habis dalam waktu singkat sebelum seluruh warga sasaran terlayani;
- Minimnya sosialisasi — publikasi pelaksanaan kegiatan belum merata sehingga banyak warga sasaran tidak mengetahui jadwal GPM;
- Salah sasaran — pembelian kerap dilakukan oleh kalangan yang tidak sesuai dengan target utama (kelompok berpenghasilan rendah);
- Kerumunan tidak tertib — antrean pembeli sering membeludak dan kurang teratur karena belum difasilitasi sistem kupon antrean.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama TPID, Bank Indonesia Cirebon, dan Perum Bulog melanjutkan sejumlah program intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, sebagai berikut:

| Tanggal | Kegiatan | Lokasi |
|---|---|---|
| 15 April 2026 | Gerakan Pangan Murah (GPM) | Desa Dawuan, Kec. Tengahtani |
| 4 Mei 2026 | Operasi Pasar Pengendalian Inflasi (OPSI) | 7 pasar milik Pemerintah Daerah |
| Mei 2026 | Peluncuran Kios Pengendali Inflasi (KOSPI) | Halaman parkir Pasar Pasalaran |
| 19 Mei 2026 | Gerakan Pangan Murah (GPM) | Desa Tambelang, Kec. Karangsembung |
| 22 Mei 2026 | Gerakan Pangan Murah (GPM) | Desa Susukan Lebak, Kec. Susukan Lebak |

Sebagai bagian dari Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon mencatat realisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Januari hingga Juli 2026 sebanyak 9 kali pelaksanaan, dengan 3 di antaranya berlangsung pada Triwulan II (April–Mei 2026) sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Selain GPM, langkah intervensi pasar diperkuat melalui peluncuran Kios Pengendali Inflasi (KOSPI) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Perum Bulog dan BI Cirebon, yang didahului oleh Operasi Pasar Pengendalian Inflasi (OPSI) sejak 4 Mei 2026 di 7 (tujuh) pasar milik Pemerintah Daerah, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus kelancaran distribusi pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, pelaksanaan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 berjalan efektif. IPH Kabupaten Cirebon berhasil terkoreksi tajam sepanjang April 2026 pasca-puncak lonjakan harga menjelang Idul Fitri, dan pergerakan harga pada Mei–Juni 2026 tetap berada pada

rentang yang wajar dan terkendali.

Keberhasilan intervensi cepat pada penanganan lonjakan harga Cabe Rawit menjelang Idul Fitri sebelumnya, yang mampu menurunkan harga hingga 25% melalui kerja sama dengan distributor luar daerah, menjadi preseden positif bagi efektivitas skema Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan operasi pasar yang terus diperkuat pada triwulan ini melalui KOSPI dan OPSI.

Namun demikian, pelaksanaan program intervensi harga di tingkat lapangan, khususnya GPM, masih menghadapi kendala operasional berupa keterbatasan stok, sosialisasi yang belum merata, potensi salah sasaran, dan ketertiban antrean yang perlu terus dibenahi. Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi pada Triwulan II 2026 antara lain:

1. Perlunya penguatan sistem distribusi kuota GPM agar lebih merata dan tepat sasaran;
2. Perlunya perluasan cakupan dan frekuensi sosialisasi jadwal kegiatan GPM dan OPSI kepada masyarakat;
3. Perlunya mitigasi dini terhadap risiko keterbatasan pasokan hortikultura pada masa transisi musim kemarau menjelang Triwulan III 2026;
4. Perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas KOSPI sebagai instrumen intervensi harga permanen di pasar-pasar daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2026, rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Memperluas kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), peternak, dan distributor swasta melalui skema CSR guna memperkuat pasokan bahan pangan pokok pada kegiatan GPM;
2. Mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk membiayai Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebagai subsidi logistik daerah;
3. Menerapkan pembatasan kuota pembelian per orang (maksimal 2 kg) pada kegiatan GPM agar stok terbagi merata kepada seluruh warga sasaran;
4. Memperkuat sosialisasi melalui pemasangan alat peraga fisik (spanduk) di titik-titik strategis kelurahan/desa jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
5. Menerapkan sistem penanda (tinta) bagi pembeli guna mencegah pembelian berulang oleh tengkulak maupun individu yang sama;
6. Memperkuat kolaborasi pengamanan pelaksanaan GPM bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Satpol PP untuk menjaga ketertiban antrean;
7. Memperluas jangkauan Kios Pengendali Inflasi (KOSPI) ke pasar-pasar daerah lainnya sebagai instrumen intervensi harga yang berkelanjutan;
8. Melanjutkan rencana pelaksanaan GPM periode Agustus–Desember 2026 di 5 (lima) lokasi baru sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, Hari Pangan Sedunia, dan HBKN akhir tahun;
9. Memperkuat koordinasi dan pemantauan produksi hortikultura lokal guna mengantisipasi keterbatasan pasokan pada masa transisi musim kemarau.